

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk paling sempurna, karena manusia memiliki akal, pikiran, perasaan, dan seluruh potensinya dibandingkan makhluk lain yang hidup di muka bumi. Potensi kemampuan dalam berpikir membuat manusia sering kali mencari makna dan hakikat hidupnya. Berbicara mengenai hal tersebut, seolah mendasar hanya saja problematik, maksudnya yaitu ketika ada jawaban maka berbenturan dengan jawaban dari pandangan lain, sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru kembali.

Seiring berjalannya proses berpikir, banyak filsuf yang memberikan pandangan-pandangannya mengenai apa itu manusia, dan apa sebenarnya hakikat manusia. Pemikirannya tidak berhenti sampai disitu, manusia pun memikirkan hakikat keberadaannya dan apa yang ada diluar dirinya. Aristoteles menjadi salah satu filsuf yang memberikan definisi mengenai manusia, ia memberikan definisi bahwa manusia adalah “*zoon politicon, a political animal*”, sifat dari berkelompok itu ialah sesuatu yang alamiah bagi manusia. Ellwood menerjemahkan pandangan Aristoteles tersebut yaitu bahwa secara alami manusia itu ialah binatang yang bermasyarakat. Perbedaan manusia dengan binatang ialah terletak pada rasionalitasnya, karena dengan rasionya manusia mampu mengkomunikasikan seluruh masalah yang harus dihadapi secara bersama dengan mengupayakan solusi dari seluruh masalahnya (Alim Roswanto, 2016).

Keterangan yang diberikan Aristoteles tersebut memberikan kejelasan, yakni berbicara manusia pastilah memiliki kaitan yang erat dengan politik, dan bahkan seluruh manusia pastilah berpolitik. Telah penulis katakan sebelumnya, berbicara mengenai manusia memang problematik, ada yang setuju dengan pandangan tertentu, ada pula yang tidak, atau bahkan memberikan pandangan dan definisi baru mengenai manusia dan hakikat keberadaannya. Pandangan Aristoteles tersebut, tidak disepakati

oleh Hannah Arendt, sekalipun pemikiran Hannah Arendt banyak dipengaruhi oleh Aristoteles, hanya saja pengertian manusia yang secara spesifik pasti dan alamiah berpolitik tidak disepakati olehnya. Menurutnya, manusia tidak secara alamiah berpolitik, melainkan diusahakan dan menjadi tugas bersama menuntut manusia lebih aktif untuk membangun tatanan dunia dan masyarakat yang lebih baik (Terre, 2011). Perbedaan pandangan tersebut antara Hannah Arendt dan Aristoteles terjadi karena Arendt pada masa perang dunia ke II tidak melihat sama sekali struktur politik yang demikian, maka dari itu memberikan pandangan manusia tidak dengan otomatis menjadi *zoon politicon*.

Membahas tentang manusia sebagai makhluk politik, maka apa sebenarnya politik itu? Politik begitu banyak memiliki definisi, baik filsuf atau para ahli ikut serta memberikan makna mengenai politik, bahkan masyarakat awam pun yang sama sekali tidak pernah belajar ilmu politik, diwaktu-waktu tertentu saat perpolitikan di wilayahnya sedang berlangsung dan cukup menarik perhatiannya, mereka ikut serta dalam memberikan makna dan pemahamannya mengenai politik.

Istilah “politik” saat ini, mulanya dikenal pada masa Plato dalam bukunya yang berjudul “*Politeia*” dan juga pada masanya Aristoteles. Dalam sejarah dan perkembangan politik hari ini, karya Plato maupun Aristoteles itu menjadi titik pangkal atau titik awal pemikiran politik. Dahulu, “politik” adalah istilah dipakai sebagai konsep pengaturan masyarakat, karena saat itu karya-karya tersebutlah yang membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan bagaimana pemerintahan mewujudkan sebuah kelompok masyarakat politik atau suatu organisasi negara yang baik (Deliar Noer, 1983).

Gabriel A. Almond memberikan definisi pada politik, politik ialah kegiatan di suatu wilayah tertentu yang berkaitan dengan kendali pembuatan keputusan publik dan dimana kendali ini dilakukan dengan instrumen yang bersifat otoritatif dan koersif (Basri Seta, 2015). Maka dari itu dapat diartikan bahwa politik itu sangat berkaitan erat dengan proses-proses pembuatan keputusan publik. Selain dari pada definisi yang telah

penulis paparkan diatas, pengertian dari politik diberikan pula oleh ilmuwan politik seperti Andrew Heywood.

Menurut pandangan Andrew Heywood, politik ialah suatu kegiatan yang di dalamnya tidak dapat terlepas dari berbagai gejala konflik dan kerja sama pada suatu bangsa dengan memiliki tujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur keberlangsungan kehidupannya (Miriam Budiardjo, 2016). Artinya, dari definisi tersebut berarti bahwa, di dalam membuat suatu aturan-aturan umum yang mengatur kehidupan membutuhkan partisipasi atau kerja sama dari masyarakat, semua orang ikut andil dan saling memberikan pandangan atau aspirasinya untuk bisa mempengaruhi keputusan publik yang disepakati. Sementara, di tengah masyarakat plural, dimana aturan dibuat dengan kerja sama dan melibatkan banyak orang, membuat gagasan atau pandangan juga tertampung cukup banyak dan bervariasi, karena aspirasi setiap individu maupun kelompok di wilayah publik tidak selalu sama, sering kali dalam banyak hal bertentangan antara aspirasi satu dengan yang lainnya (Surbakti Ramlan, 1992). Maka sangat sulit mencari titik temu pada aspirasi-aspirasi tersebut.

Teori proses politik (*The Political Process Theory*), di dalamnya berfokus lebih banyak kepada berbagai faktor yang memungkinkan warga negara biasa membentuk suatu gerakan sosial mereka sendiri yang itu sebenarnya bertentangan dengan masyarakat yang dominan (Sukmana Oman, 2016). Dalam proses politik (*political process*) sering kali mengacu kepada suatu keadaan dimana seseorang berusaha untuk memperoleh akses pada suatu kekuasaan politik dan lalu menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya (Irianto Maladi Agus, 2015).

Sekarang kita bisa melihat kenyataan, yakni aspirasi yang diangkat sebagian bukan semata-mata untuk kebaikan bersama seluruh masyarakat, tetapi untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya, itu sebabnya konflik sering kali terjadi dalam prosesnya, karena proses pembuatan suatu keputusan publik tidak terlepas dari aspirasi dan proses antar berbagai kepentingan, yang pada akhirnya sering kali berbenturan. Namun, tidak bisa disimpulkan pula jika keseluruhan aspirasi yang keluar dan

terutarakan ialah dengan aspirasi yang bertujuan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi atau kelompoknya semata.

Kelompok berkepentingan tersebut bervariasi, bisa untuk kepentingan kelompok keagamaannya, rasnya, ataupun yang lainnya. Seperti, yang pernah terjadi pada umat islam, yang mana terdapat beberapa orang islam berhasil mendapatkan pendidikan sejak zaman kolonial, mereka pun memiliki kontribusi untuk perkembangan agamanya khususnya dalam tatanan politik. Dengan memperhatikan tuntutan zaman, mereka berusaha memberikan sebuah penawaran dengan merumuskan kembali ide-ide kemasyarakatan dan politik islam. Hanya saja, justru menurut Deliar Noer, yakni dalam percobaan reformulasi ide-ide mereka jatuh pada semangat apologia yang bersifat defensif, dan menurut Nurcholish Madjid itu menjadi sebuah kekurangan (Nurcholish Madjid, 1999).

Lebih jauhnya, Peter Merkl mengatakan, yakni perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri (*politics at its worst is a selfish grab for power, glory, dan riches*) ialah bentuk dalam politik yang paling buruk (Budiardjo Miriam, 2007). Setelah melihat dari pernyataan dari Peter Merkl mengenai bentuk politik yang paling buruk, salah satunya ialah perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri. Maka politik itu sendiri berkaitan erat dengan kekuasaan, dan ada pula hasil studi yang membahas mengenai hubungan kekuasaan dan kekerasan dalam konteks wilayah politik. Kekekerasan dalam politik pernah terjadi pada masa perang dunia II dan itu teralami sendiri oleh salah satu filsuf yakni Hannah Arendt.

Akar mulanya politik yang dibawakan oleh Plato dan Aristoteles sebagai ide utamanya dalam filsafat sosial-politik ialah dengan menciptakan keadilan dalam suatu negara kota, sehingga mampu memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakatnya. Ide utama yang dibawakan Aristoteles dan Plato memberikan makna jelas dan positif pada istilah politik dan keberadaannya. Namun, jika ditelusuri lebih jauh mengapa politik dan kekuasaan justru membawa hal yang berbau kekerasan? apakah politik abad modern sampai dengan sekarang justru menghendaki kekerasan? dan itu berarti jauh dari sikap toleransi dan kebersamaan yang seharusnya tumbuh dalam politik. Segala

bentuk prasangka terhadap politik perlu dikaji secara seksama dan dicari makna sebenarnya.

Sementara, seiring berjalannya waktu, istilah “politik” pada saat ini menjadi kata yang sebenarnya relatif populer, karena manusia seapatis mungkin terhadap lingkungannya, tetap saja selalu dihadapkan dengan beberapa momentum yang menuntutnya untuk turut berpartisipasi dalam politik, meskipun sebenarnya mereka belum bisa dikatakan sebagai makhluk politik yang sesuai dengan pandangan Hannah Arendt.

Pengaruh politik juga sangat besar, semua orang harus menjadi manusia politik, yang ikut serta terlibat dalam politik, jika seseorang sudah tidak berpolitik maka rentan terhadap munculnya ketotaliterianan. Seluruh yang tertata atau terelisasikan bukan atas dasar kebutuhan dan kehendak masyarakat, melainkan sesuai dengan kepentingan penguasa yang totaliter. Karena kekuasaan yang otoriter akan menghendaki terjadinya kekerasan dalam politik. Adanya permasalahan demikian, membuat peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai hal ini, dimana politik dinilai kurang baik keberadaannya, sampai-sampai kekerasan masuk di dalam tubuh politik itu sendiri. Sisi inklusif dan toleran seolah tidak ada di dalamnya, yang ada hanyalah kepentingan, kekuasaan, dan kekerasan. Padahal, politik itu sendiri masuk dalam kawasan atau ruang publik yang bersifat plural sehingga adanya sikap toleransi. Semua permasalahan itu begitu jauh dari akar mula adanya politik itu sendiri.

Maka dari itu, menarik kiranya membahas politik dari sisi yang lain, yaitu dengan menganalisisnya dan mencari sisi inklusif dan toleran di dalamnya, apakah sebenarnya di dalam politik memang dimuat atau tidak sama sekali?. Lebih menarik lagi jika kita membahas sisi inklusif dan toleran dalam politik dari tokoh pemikir terkemuka barat dan tokoh pemikir islam sebagai pembanding, tentang pandangan-pandangannya mengenai politik, yang mana kedua tokoh tersebut telah memberikan sumbangsih besar pada peradaban manusia.

Hannah Arendt filsuf dari barat yang pemikirannya memberikan sumbangsih besar, namun mengenyampingkan agama dalam urusan politiknya dengan berbagai

alasan, dan Madjid sebagai tokoh islam yang pemikiran utamanya justru mengharmoniskan keduanya, justru agama yang memiliki nilai-nilai luhur yang menjadi dasar atau inti dalam konsep pemikiran politiknya. Sehingga bagaimana keduanya bisa memberikan keselarasan di tengah latar belakang kehidupan yang berbeda.

Alasan serta sebab yang telah penulis paparkan diatas, membuat penulis tertarik untuk mengangkat tema filsafat politik dalam bahasan skripsi ini, dengan mengangkat judul skripsi “INKLUSIVITAS DAN TOLERANSI DALAM POLITIK (Studi Komparatif Konsep Pemikiran Politik Hannah Arendt dan Nurcholish Madjid).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diberikan penjabaran sebelumnya di atas, penulis tertarik dengan pemikiran filsuf perempuan, yakni Hannah Arendt dan pemikir Islam Nurcholish Madjid yang keduanya memiliki persamaan akan ketertarikannya pada bahasan mengenai politik dalam upayanya menyikapi permasalahan dan prasangka negatif terhadap keberadaan politik. Maksud dari prasangka negatif disini ialah prasangka terhadap politik yang gunanya hanya dijadikan kontestasi perebutan kekuasaan tanpa melihat hakikat politik yang sebenarnya dan cenderung bersifat eksklusif. Sebagaimana telah dijelaskan oleh kedua tokoh tersebut Hannah Arendt dan Nurcholish Madjid mengenai pemikiran politik dalam upayanya mengembalikan konsep politik sesuai dengan hakikat keberadaannya. Dari penjelasan tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep filsafat politik dari Hannah Arendt dan Nurcholish Madjid?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Hannah Arendt dan Nurcholish Madjid dalam kaitannya dengan inklusivitas dan toleransi pada pemikiran politiknya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tulisan ini menerangkan dan menguraikan teori dari filsafat politik dan mencoba untuk menganalisisnya. Penulis meneliti kajian ini tidak dengan tanpa tujuan yang jelas, adapun tulisan ini dibuat dengan tujuan antara lain yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran politik dari Hannah Arendt dan Nurcholish Madjid
- b. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Hannah Arendt dan Nurcholish Madjid dalam kaitannya dengan inklusivitas dan toleransi pada konsep pemikiran politik?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil analisis penelitian yang telah ditulis ini, diharapkan dapat menjadi upaya penjernihan definisi dan makna dari pemahaman akan politik yang sebelumnya sudah terdefinisi secara tidak jelas, sehingga menghasilkan makna yang ambigu pada masyarakat umum dan sering kali menimbulkan prasangka terhadap keberadaannya. Kemudian, tulisan ini juga diharapkan bisa memberikan penyadaran kembali akan pentingnya menjadi warga negara yang aktif, ikut serta untuk berperan dalam politik sebagai wujud kebebasan sebagai warga negara. Demi tertatanya ruang publik yang baik, nyaman, dan rukun, sebagai tempat hidup bersama.

Selain dari itu, dengan menyandingkan kedua tokoh barat dan islam pada penulisan skripsi ini, diharapkan dapat menjadi salah satu pengembang ilmu di jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

D. Kajian Pustaka

Dari berbagai literatur penelitian, cukup banyak tulisan yang membahas tentang Hannah Arendt dan Nurcholish Madjid, baik dari segi ketokohnya maupun pemikirannya yang berhasil memberikan sumbangsih besar pada peradaban, dan banyak pula tulisan yang mengangkat tema tentang materi politik itu sendiri, baik itu

politik Indonesia atau pun politik kedua tokoh tersebut, hanya saja belum ada yang membahas atau menganalisis sisi inklusivitas dan toleransi dari konsep politik yang diberikan oleh keduanya.

Berbagai literatur yang dapat menunjang penulisan ini baik itu sumbernya dari buku ataupun jurnal, dijadikan bahan tambahan data untuk penelitian yang lebih otentik. Studi kepustakaan tersebut penulis maksudkan untuk mencari konsep yang ada relevansinya dengan masalah yang dianalisis sehingga dapat lebih memperkuat kebenaran hasil penelitian ini. Adapun literatur yang dapat menunjang dan dapat dijadikan bahan tambahan data tulisan ini ialah data yang telah pernah dilakukan penelitian sebelumnya yaitu diantaranya, jurnal yang ditulis oleh Yosef Keladu Koten pada tahun 2019, dengan judul *“Konsep Hannah Arendt tentang politik sebagai pembicaraan dan kontribusi dalam menyikapi pluralitas pandangan.*

Jurnal tersebut memberikan penerangan dan penemuan peneliti dalam “politik sebagai pembicaraan” Hannah Arendt, bahwa dari pemikiran Hannah Arendt menjadi benih munculnya demokrasi deliberatif. Dimana dalam pandangannya terdapat sebuah penawaran yang menjadi sumbangsih dalam metode pendekatan demokrasi deliberatif karena cocok digunakan dalam menyikapi masyarakat plural, dibandingkan dengan demokrasi liberal yang memiliki banyak kelemahan jika digunakan dalam masyarakat yang plural. Pemikiran Hannah Arendt tentang “politik sebagai pembicaraan” yang menjadi benih munculnya demokrasi deliberatif yaitu tawaran akan pandangan bahwa deliberatif bukan pertama-tama mencapai konsensus melainkan mentransformasikan pandangan-pandangan yang berbeda.

Selain dari itu literatur yang dapat dijadikan pendukung dalam penelitian ini yaitu Jurnal dari I Gusti Agung Ayu Brenda Yanti, Wahyu Budi Nugroho, Gede Kamajaya, dengan judul *“Konsep, Praktik, dan Kontekstualisasi Manusia Politik dan Ruang Publik Hannah Arendt”*. Tulisan tersebut bertujuan untuk menjabarkan konsep ideal manusia politik Hannah Arendt melalui penjabaran filsafat tindakannya, peneliti menemukan gambaran praktik dari teori maupun konsep manusia politik dengan berfokus pada bagaimana aktivitas berpikir yang dimanifestasikan dalam bentuk

tindakan menciptakan subjek politik dan peneliti menjelaskan bagaimana praktik serta kontemplasinya.

Penelitian serupa yang turut membahas Hannah Arendt sebagai tokoh dari tulisannya ialah skripsi dari Fahri Ansyah yang tulis pada tahun 2009 dengan judul “*Kebebasan Beragama di Indonesia Perspektif Teori Ruang Publik dan Ruang Privat Hannah Arendt*”. Skripsi tersebut yaitu memaparkan sebuah gambaran kebebasan dalam beragama di Indonesia, mulai pada era Orde Baru hingga era Reformasi, selanjutnya skripsi ini dengan menggunakan perspektif ruang publik dan ruang privat Hannah Arendt mencoba mengkaji sejauh mana dampak kebebasan beragama di Indonesia.

Selain dari jurnal dan skripsi diatas, buku yang sangat menunjang dalam penulisan skripsi ini yaitu buku karya Maurizio Passerin d’Enteves, tahun 2003 dengan judul *The Political Philosophy of Hannah Arendt*, Yang telah diterjemahkan oleh M. Shafwan, Judul buku tersebut menjadi *Filsafat Politik Hannah Arendt*, penerbit CV. Qalam, Yogyakarta. Cetakan pertama buku ini pada Mei 2003. Tokoh utama yang dibahas dalam buku itu ialah Hannah Arendt, penulis banyak mengutip langsung dari karya-karya Arendt seperti *The Origins of Totalitarianism*, *On Revolution*, *The Human Condition*, *The Life of the Mind*, dll. Buku tersebut memberikan penjabaran yang jelas dan teliti pada pandangan-pandangan Hannah Arendt yang ia tulis secara sistematis dari seluruh konsep politik dari Arendt. Buku tersebut juga di dalamnya penulis sertakan kritik orsinil penulis terhadap pemikiran Hannah Arendt. D’enteves sebagai penulis menunjukkan bahwa konsepsi Arendt sebagai kerangka paling baik untuk kehidupan publik dalam dunia yang modern dengan menjadikan warga negara yang aktif dan deliberatif dalam politik.

Selanjutnya yaitu buku Hannah Arendt yaitu yang telah diterjemahkan oleh David Setiawan, dengan judul “*Kebenaran dan Dusta dalam Politik*”. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Circa Yogyakarta, dengan cetakan pertama, Oktober 2019, Buku tersebut menjelaskan sisi politik yang disamping memiliki kebaruan terdapat pula

kebohongan. Untuk itu, harus adanya suaka kebenaran yang mampu memandang netral terhadap politik itu sendiri.

Buku karya Nurcholish Madjid dengan judul *Cita-cita Politik Islam*, turut menjadi bahan dalam penulisan skripsi ini, bahkan dijadikan salah satu sumber primer, buku Madjid ini di terbitkan oleh penerbit Paramadina, Jakarta pada tahun 1999. Buku tersebut berisikan tulisan Madjid mengenai konsep filsafat politik yang menjadi cita-citanya, konsep politik yang dibahasnya selalu dikaitkan dengan politik di negara Indonesia. Pandangan politik dari Madjid berlandaskan pada ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam agama islam.

Buku dengan judul *Masyarakat religius* karya Nurcholish Madjid turut dijaikan sumber rujukan, karena di dalamnya memuat hal-hal yang tak terlepas dengan partisipasi masyarakat dalam politik, sebagai perwujudan dari kebebasan manusia. Buku tersebut terbitkan oleh penerbit Dian Rakyat, Jakarta. Cetakan IV pada tahun 2010.

Dari berbagai literatur yang telah diteliti sebelumnya, baik itu yang telah ditulis dalam buku atau jurnal, yang menjadi fokus dalam penulisan skripsi ini yaitu peneliti menemukan suatu kecenderungan sikap toleran dalam filsafat politik Hannah Arendt dan Nurcholish Madjid, yang di dalamnya terdapat sisi inklusif pada manusia politik versi Hannah Arendt dan manusia yang saleh dalam bahasan Nurcholish Madjid, yang kemudian mewujud di dalam ruang publik dengan segala perbedaan, dan masalahnya yang harus diselesaikan demi tatanan masyarakat yang baik dengan terciptanya solidaritas dalam masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Titik awal politik pada hakikatnya untuk keadilan dan kebahagiaan. Namun, istilah tersebut menjadi problematik dan banyak memiliki makna, tak jarang pula menjadi sebuah prasangka terhadap keberadannya. Disini, penulis merasakan bahwa opini mengenai makna politik tersebut justru negatif, tidak mengarahkan pada sisi kebersamaan dan solidaritas. Politik ibarat dua sisi mata uang, baik dan buruk ada

dalam satu materi. Di satu sisi menyimpan tujuan yang baik namun disisi yang lain justru sebaliknya.

Sebuah pemikiran yang ada, dulu ataupun kini tidak lahir dengan begitu saja, tetapi ada proses yang menyadarkan dirinya untuk dapat memahami situasi aktual apa yang terjadi, lalu memberikan sebuah respon, dan pemikiran yang lahir itulah sebagai respon terhadap situasi dan perkembangan yang mengitarinya tersebut. Banyaknya, dan perbedaan definisi dan makna yang diberikan oleh filsuf dan para ahli rata-rata dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang peristiwa kehidupan tokoh tersebut, filsuf memberikan pandangannya sebagai respon dari latar belakang peristiwa yang ia alami.

Sejarah berupaya memberikan pengertian dan makna pada politik. Menurut sejarah, politik awal mulanya dikenal pada masa Plato dan Aristoteles dengan karyanya berjudul "*Politeia*" yang pula dikenal dengan istilah "Republik", dan selanjutnya berkembang melalui karya Aristoteles, yang dikenal dengan "*Politica*" (Deliar Noer, 1983). Ide utama filsafat sosial-politiknya yaitu untuk kebahagiaan warganya dengan menciptakan suatu keadilan dalam negara kota. Pemikiran kedua tokoh tersebut memiliki ide utama yang sama, hanya saja yang membedakan antar keduanya ialah pada cara dalam mewujudkannya. Pada pemikiran Plato hanya bimbingan sinar pengetahuan yang ideal dari filsuf lah yang dapat menjadikan terjadinya negara-kota yang adil. Sementara Aristoteles terjadi karena proses instingtif manusia sebagai makhluk sosial (Alim Roswanto, 2015).

Di tengah masyarakat, sejak zaman dulu pada masa Plato dan Aristoteles sampai dengan zaman modern, politik masih saja menjadi suatu persoalan yang masih tetap terbuka sampai dewasa ini, persoalan politik masih sering kali terjadi, maka dari itu hal politik menjadi persoalan yang terbilang masih dan selalu aktual.

Dari definisi yang sempat dibahas pada bagian sebelumnya, filsafat sosial-politik ialah suatu kajian kritisikal atas pandangan yang seharusnya mengenai masyarakat, dan dengan ragam kepentingan dalam suatu wilayah, maka filsafat sosial-politik pun menjadi kajian kritik pula terhadap kekuasaan otoritatif yang memiliki kekuatan memaksa dalam mengatur banyak orang, kritik tersebut dengan tujuan agar

cita-cita mengenai suatu masyarakat ideal itu tercapai (Alim Roswantoro, 2015). Tampak memang terdapat otoritas kekuasaan yang lebih memaksa kepada hubungan politik antar warga negara, bahkan ada pula filsuf yang dalam karyanya mengangkat tentang ketotaliterianan, dengan memberikan kritik pada segala sistem yang otoriter dan kekuasaannya lebih memaksa pada politik, yaitu Hannah Arendt.

Hannah Arendt merupakan pemikir politik yang memiliki kontribusi penting pada abad modern. Hannah Arendt merefleksikan pemikiran politik dengan kaca mata yang berbeda. Dalam pemikirannya, terdapat pandangan bagaimana seharusnya politik itu terejawantahkan, politik Arendt di ejawantahkan lewat dasar-dasar politik itu sendiri. Menurutnya, dasar atau konsepsi dasarnya politik ialah pada gagasan *active citizenship* (kewarga negaraan aktif), gagasan tersebut yakni terletak pada arti penting keterlibatan warga negara dan penilaian kolektif tentang seluruh persoalan yang menyangkut dan mempengaruhi hajat hidup banyak orang. Tradisi pemikiran yang demikian ialah seperti halnya tradisi klasik republikanisme sipil, yang dahulu pernah muncul pada zaman Aristoteles.

Gagasan filsafat politik dari Hannah Arendt di pengaruhi oleh beberapa pendahulunya, seperti Plato dan Aristoteles yang ide utama mengenai filsafat sosial-politiknya sudah sedikit diulas diatas, dan masih ada beberapa filsuf lainnya, itu sebabnya terdapat kesamaan dalam pemikiran Arendt dan Aristoteles, seperti halnya tradisi berpikir klasik republikanisme sipil (Maurizo Passerin d'Enteves, terj. M. Shafwan, 2003). Kemunculan zaman modern yang memiliki ciri dan karakter kurang baik dan harus diperbaharui merupakan awal filsafat politiknya. Filsafat politik Arendt berangkat dari berbagai kritik pada modernitas dan berbagai peristiwa pada abad modern, khususnya kritik mengenai sistem ketotalitarianan zaman modern.

Filsafat Hannah Arendt membahas empat landasan dalam filsafatnya yaitu, modernitas, tindakan, penilaian, kewarganegaraan. Kritik pada modernitas menjadi titik awal dalam bahasanya (Maurizo Passerin d'Enteves, terj. M. Shafwan, 2003). Visi modernitas menurut Arendt terkesan dingin dan parsial. Seperti yang penulis paparkan sebelumnya, bahwa pandangan dari filsuf itu dipengaruhi atau dilatar

belakangi oleh berbagai peristiwa yang terjadi pada masa hidupnya. Seperti halnya Hannah Arendt, penilaian negatif mengenai modernitas itu muncul karena pengalamannya yang sangat getir pada abad 20, dimana ia berada di tengah-tengah kungkungan totalitarianism (Maurizo Passerin d'Enteves, terj. M. Shafwan, 2003).

Latar belakang kehidupan Hannah Arendt di tengah pengekangan, teror, dan kekerasan, tidak membuat dirinya memiliki gagasan buruk pada politik, sekalipun ia merasakan sendiri kekejaman Nazi saat itu kepadanya sebagai seorang yahudi. Pemikiran Arendt mengenai politik memiliki pengaruh besar dalam dunia politik, malah, ada penelitian yang menyatakan bahwa Arendt sebagai pembicaraan ialah cikal bakal kemunculan demokrasi deliberatif, dimana sistem ini ialah sistem yang ideal digunakan untuk masyarakat yang plural (deliberatif demokrasi) (Yosef Keladu Koten, 2019).

Pandangan Arendt mengenai politik jauh dari praktik politik pada zamannya, Filsafat politiknya Arendt lebih dan bahkan harus mengehendaki pluralitas, kebebasan, dan kesetaraan. Sebagaimana dasar konsepsi politiknya yang harus di dasarkan pada keterlibatan *active citizenship* (kewarga negaraan aktif), maka seluruh masyarakat memiliki tugas yang khas, yaitu terlibat pada berbagai persoalan yang menyangkut tatanan kehidupan bersama (Maurizo Passerin d'Enteves, terj. M. Shafwan, 2003). Dasar pandangan mengenai konsep politik yang turunkan Arendt memiliki persamaan dengan tokoh islam yaitu Nurcholish Madjid, sekali pun terdapat perbedaan pula dalam sisi yang lainnya.

Kecenderungan filsafat barat terhadap dunia kontemplasinya selama ini, turut menjadi kritik Arendt, yang ia bahas dalam *vita activa* dengan merumuskan tiga wujud aktivitas manusia. Filsafat dunia Barat yang cenderung berhierarki dengan lebih mengutamakan teori di atas praktik dan lebih menyibukkan diri dengan esensi dan keabadian. Sementara, Arendt keduanya, antara *vita activa* maupun *vita contemplativa* tingkatannya seimbang tidak memiliki hierarki yang mana yang harus mendominasi (Hannah Arendt, 1958). Menurut Arendt dalam *vita activa*, wujud aktivitas tertinggi dalam kehidupan manusia ialah tindakan (*action*) disamping aktivitas yang lainnya,

yaitu kerja (*labor*) dan karya (*work*). Dikatakan lebih tinggi tindakan dari pada yang lain, dikarenakan, di dalamnya mengandaikan kebebasan dan pluralitas, dan pada tindakannya, terdapat keterlibatan aktivitas berpikir pada fase sebelum tindakannya (Hannah Arendt, 1958).

Tindakan memerlukan tempat untuk bertindak, dan seseorang dalam tindakannya harus berada dalam konteks pluralitas untuk memperoleh persetujuan orang lain maka dari itu tindakan ada dalam ruang publik, tindakan memerlukan orang lain (Maurizo Passerin d'Enteves, terj. M. Shafwan, 2003). Seperti halnya sirkus yang beratraksi membutuhkan audiens, tanpa keberadaan dan pengakuan orang lain, tanpa kehadiran komunitas yang melihat dan menilai penampilan maka tindakan adalah tindakan yang sia-sia. Begitu pun dengan politik, bagi Arendt politik merupakan persoalan dunia bersama. Aktivitas politik terletak dalam ruang publik, dimana warga negara saling bertemu dan bertukar pendapat satu sama lain. Sama halnya dengan pemikir islam yakni Nurcholish Madjid yang ikut mewarnai wacana pemikiran politik, dan memiliki pemikiran yang sama dengan Arendt bahwa harus ada ruang publik, yang mana warga negara saling berdiskusi bertukar pendapat.

Nurcholish Madjid merupakan tokoh pemikir islam sama halnya dengan Arendt, pemikiran politiknya tumbuh atas kritiknya pada modernitas dan berbagai peristiwa, pertikaian di barat pada abad modern, yang mana sistem dikuasai oleh kejahatan kolonialisme dan imperilisme internasional yang cenderung lebih eksklusif (Nurcholish Madjid, 1997). Nurcholish Madjid juga tak kalah hebatnya dengan Hannah Arendt yang pemikirannya dapat menjadi rujukan di abad modern ini, ia pun ikut memberikan sumbangsih besar, sehinga mampu menjadikan masyarakat, khususnya umat islam turut menyadari pentingnya partisipasi dalam politik dengan cara melihat bagaimna sejarah zaman dulu Rasulullah yang juga berpolitik, sehingga umat islam saat itu bisa bersama-sama dengan umat yang lain dan saling bekerja sama.

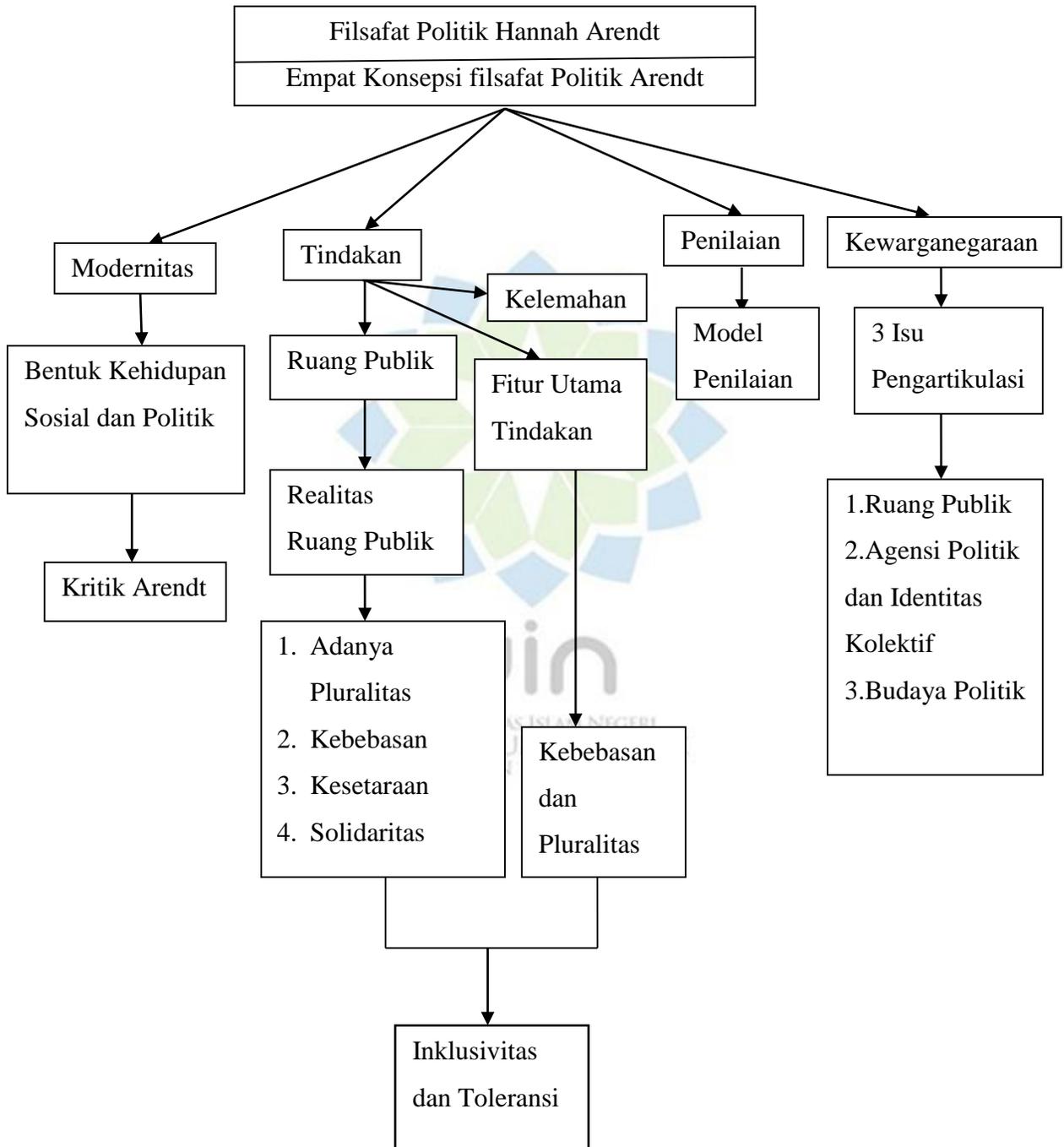
Pemikiran Arendt dan Nurcholish Madjid menyuguhkan politik dari kacamata yang berlainan, sekalipun latar belakang politik keduanya tidak baik-baik saja, seperti halnya Arendt yang latar belakang kehidupan politiknya penuh dengan ketotaliteran,

namun tetap ia menyuguhkan sisi politik yang lebih inklusif atau terbuka, dimana ia mementingkan sebuah ruang kebersamaan, berdiskusi, bertukar pandangan antar individu dalam ruang publik, dan masih melihat potensi adanya kebenaran dalam pandangan orang lain yang berbeda, sehingga apapun hasil konsensus bisa diterima dengan penuh sikap toleransi.

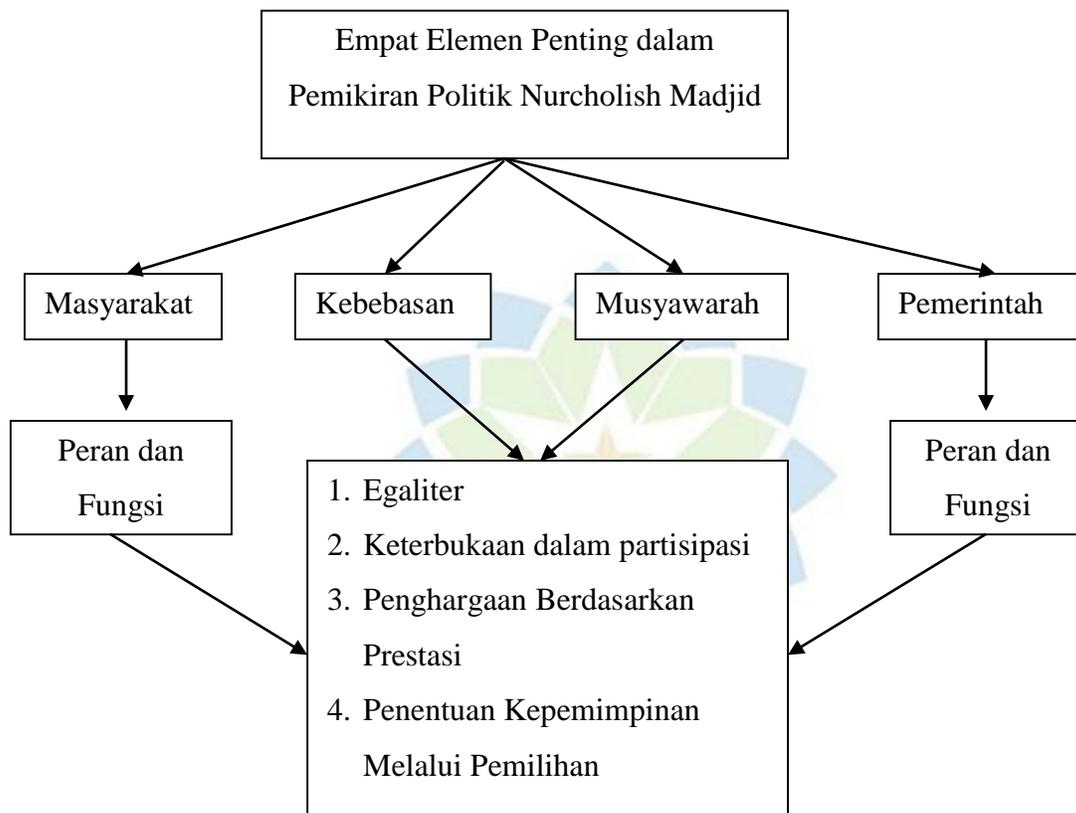
Kekuasaan yang juga termasuk dalam bahasan politik seakan membawa persepsi dan prasangka yang negatif, namun nyatanya mereka (Hannah Arendt dan Nurcholish Madjid) memberikan pandangan yang berbeda, dengan memberikan penjelasan yang membedakan antara kekuasaan dan kekuatan, yang sering kali orang tidak bisa melihat dan menilai batas antar keduanya. Sekalipun tindakan merupakan wujud aktivitas tertinggi menurut Arendt hanya saja tidak luput dari kekurangan, begitu pun menurut Madjid, itikad baik seseorang belum bisa dikatakan baik, itikad baik pun tidak luput dari kekurangan, maka menurut keduanya, sangat penting tindakannya harus mewujudkan keluar di bawah pengujian umum. Untuk itu, hal tersebut membuat dorongan untuk lebih inklusif dan mempertimbangkan segala hal.

Untuk mempermudah memahami konsep pemikiran Arendt dan Nurcholish Madjid mengenai filsafat politik, maka penulis menggambarkan peta pemikiran sebagai berikut.

Gambar 1.
Peta Pemikiran Konsep Politik Hannah Arendt



Gambar 2.
Peta Pemikiran Konsep Politik Nurcholish Madjid



F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam seluruh penelitian, selalu menggunakan suatu prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai hasil yang valid sesuai dengan harapan yang diinginkan peneliti. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian bergantung pada konteks masalah apa yang akan diteliti, dan pada penelitian ini difokuskan pada bahasan tentang filsafat politik dari salah satu filsuf perempuan berketurunan yahudi yakni Hannah Arendt dan tokoh pemikir islam yakni Nurcholish Madjid.

1. Metode Penelitian

Peneliti menetapkan penelitian ini dengan model komparasi dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*Library research*). Penulis menelaah buku-buku yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas, hasil dari analisis literatur ini yaitu data yang dikehendaki untuk kemudian dapat ditelaah secara mendalam (Moh. Nasir, 2000).

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah merupakan cara yang penting untuk digunakan dalam merumuskan suatu ilmu sehingga dapat dibuktikan kebenarannya secara *empiris*. Berdasarkan kata tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu *cara ilmiah, data tujuan, dan kegunaan* (Sugiyono, 2016).

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode *content analysis* atau analisis isi dengan uraian data yang sifatnya deskriptif. Metode tersebut peneliti mengungkapkan isi dari sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakat pada saat buku tersebut ditulis. Selain dari itu, dengan cara ini peneliti dapat membandingkan dalam bidang yang sama, antara satu buku dengan buku yang lainnya (Abdurrahman Soejono , 1999). Sifatnya penelitiannya deskripsi, membuat peneliti menjelaskan seluruh konsepsi pemikiran tokoh dengan melihat bagaimana konsepsi pemikiran tokoh tersebut (Sudarto, 2002). Dalam hal ini yang akan di deskripsikan dan dianalisis ialah konsepsi pemikiran politik dari Hannah Arendt dan

Nurcholish Madjid. Dalam penelitian ini konsep tokoh diuraikan secara teratur dan menyeluruh oleh peneliti (Anton Bakker dan Ahmad Charris Zubair, 1999).

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengumpulkan data-data berupa bahan yang relevan, menunjang, dan dibutuhkan dalam proses penelitian. Terdapat dua kategori data, yakni: data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer

Asal data primer ini yaitu berasal dari buku *The Origins of Totalitarianism*, setelah diterjemahkan menjadi Asal usul Totalitarianisme yang di terbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia dan terbagi dalam tiga jilid, Jilid I Antisemitisme (penerjemah A. Agus Nugroho, Jakarta, 1993), Jilid II Imperialismelois (penerjemah Alois A. Nugroho, Jakarta, 1995), Jilid III Totalitarisme (penerjemah J.M Soebijanta, Jakarta, 1995).

Sumber primer yang selanjutnya yaitu buku dengan judul "*Cita-cita Politik Islam*" karya dari Nurcholish Madjid, penerbit buku ialah Paramadina, Jakarta yang di cetak pertama kali pada tahun 1999.

2. Sumber data sekunder

Adapun yang kedua yang peneliti jadikan sumber sekunder yaitu data yang berasal dari literatur atau buku-buku kepustakaan lain yang memiliki keterkaitan khusus dengan judul penelitian ini, seperti jurnal-jurnal, skripsi, artikel, yang memiliki kaitan dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini, guna memperkuat validitas hasil dari skripsi ini. Data sumber sekunder ini digunakan peneliti untuk memperkuat sumber data primer yang sudah disebutkan sebelumnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yaitu dengan cara studi dokumen atau *book survey*, teknik ini digunakan dengan tujuan untuk mengumpulkan data-data kepustakaan yang lebih mengkrucut dan terfokuskan pada hal-hal yang lebih mengarah pada judul yang diangkat dalam skripsi ini. Proses tersebut ditempuh dengan membaca, menyimak dengan teliti, dan mencatat setiap bahan-bahan yang berkaitan dengan kepustakaan yang sekiranya berhubungan dengan tema dalam penelitian. Yang kemudian digunakan dalam penyusunan hasil penelitian sesuai dengan maksud serta tujuan penelitian.

Cara tersebut digunakan karena peneliti menganggap hal tersebut, atau teknik tersebut jika digunakan dapat mempermudah peneliti dalam mengelompokkan data.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data telah terkumpul dari berbagai sumber, menelaah dan menemukan data yang berkaitan dengan inklusivitas dan toleransi yang terdapat di dalam pemikiran politik Hannah Arendt dan Nurcholish Madjid, kemudian menyinggungkan pemikiran kedua tokoh tersebut, dianalisis persamaan dan perbedaannya dalam kaitannya dengan inklusivitas dan toleransi pada politik

